



**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, IMPLEMENTASI  
ANGGARAN, PELAPORAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN  
EVALUASI KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Deandra Puspita Ratri**

**NIM. 120810301090**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, IMPLEMENTASI  
ANGGARAN, PELAPORAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN  
EVALUASI KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Jurusan Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar sarjana

Oleh :

**Deandra Puspita Ratri**  
**NIM. 120810301090**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Orang tuaku yang sangat aku cintai dan sayangi Ibu Wiwik Martiwidiastuti dan Bapak Sudiby, yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis;
2. Adek-adekku yang sangat aku sayangi Aditya Ibnu Ibrahim dan Farrel Maulana Ramadhan, dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan;
3. Dosen Pembimbing saya Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Sc, Ak dan Ibu Andriana, SE, M.Sc yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang kubanggakan

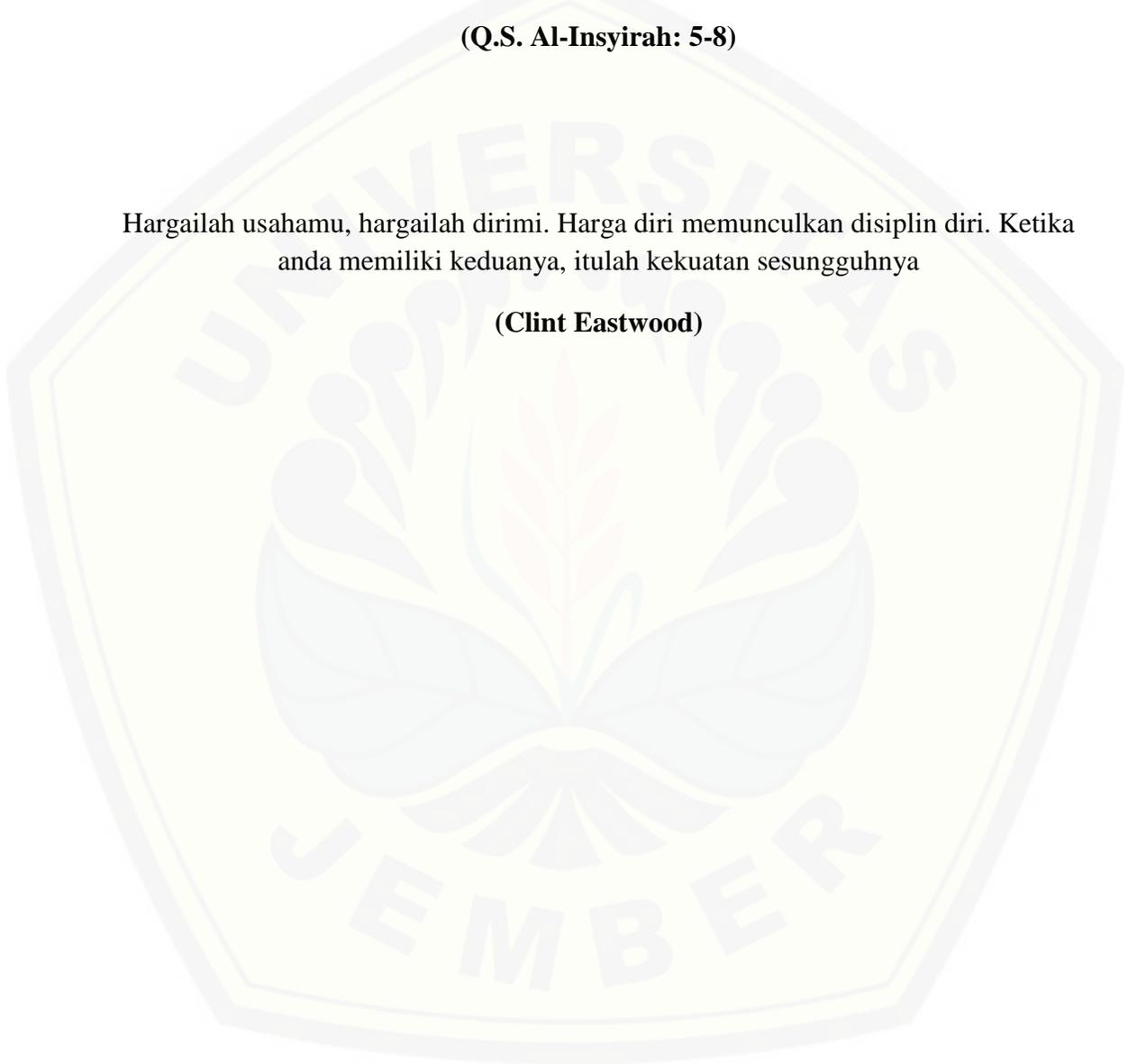
## MOTTO

Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

**(Q.S. Al-Insyirah: 5-8)**

Hargailah usahamu, hargailah dirimi. Harga diri memunculkan disiplin diri. Ketika anda memiliki keduanya, itulah kekuatan sesungguhnya

**(Clint Eastwood)**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Deandra Puspita Ratri

NIM : 120810301090

Judul Skripsi : PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, IMPLEMENTASI ANGGARAN, IMPLEMENTASI ANGGARAN, PELAPORAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN EVALUASI KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat merupakan hasil karya sendiri bukan jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Mei 2017

Yang Menyatakan,

Deandra Puspita Ratri

NIM. 120810301090

**SKRIPSI**

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, IMPLEMENTASI  
ANGGARAN, PELAPORAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN  
EVALUASI KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**Oleh :**

**Deandra Puspita Ratri**

**NIM. 120810301090**

**Pembimbing :**

**Dosen Pembimbing I : Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak**

**Dosen Pembimbing II : Andriana, SE, M.Sc, Ak**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : PENGARUH PERENCAAN ANGGARAN, IMPLEMENTASI ANGGARAN, PELAPORAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN EVALUASI KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER

Nama Mahasiswa : Deandra Puspita Ratri

N I M : 120810301090

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 20 April 2017

*Yang Menyetujui,*

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak.

Andriana S.E., M.Sc., Ak.

NIP.19640809 199003 2001

NIP. 19820929 201012 2002

*Mengetahui,*

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak.

NIP. 19640809 199003 2001

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, IMPLEMENTASI  
ANGGARAN, PELAPORAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN  
EVALUASI KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Deandra Puspita Ratri

NIM : 120810301090

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

6 Juni 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak. (.....)  
NIP 197102172000031001

Sekretaris : Dr. Agung Budi Sulistiyono, S.E., M.Si, Ak. (.....)  
NIP 197809272001121002

Anggota : Aisa Tri Agustini, SE, M.Sc. (.....)  
NIP 198808032014042002

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak.  
NIP. 197107271995121001

**Deandra Puspita Ratri**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran berbasis kinerja serta evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah di Jember. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, Uji t, serta Uji F. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran berbasis kinerja dan evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Jember. Hal ini mengakibatkan semakin baik pengerjaan perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah daerah.

**Kata kunci :** Perencanaan Anggaran, Implementasi Anggaran, Pelaporan Anggaran Berbasis Kinerja, Evaluasi Kinerja

**Deandra Puspita Ratri**

*Accounting Department, Economic and Business Faculty, Jember University*

## **ABSTRACT**

*This study aims to know and analyze in depth about budget planning, budget implementation, performance-based budget reporting and performance evaluation on performance accountability from government agencies in Jember. This study uses primary data obtained from respondents' answers on the questionnaires used in the study. Method of data analysis using Descriptive Statistics, Data Quality Test, Classical Assumption Test and Hypothesis Testing consisted of Multiple Linear Regression Method, Coefficient of Determination, Test of t, and F Test. The result of research indicate that budget planning, budget implementation, performance budget reporting and Performance evaluation has a positive and significant impact on the performance accountability of local government agencies of Jember district. This results in better budget planning, budget implementation, budget reporting and performance evaluation, it will improve performance accountability of local government agencies.*

**Keywords:** *Budget Planning, Budget Implementation, Performance Based Budget Reporting, Performance Evaluation*

**RINGKASAN**

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, IMPLEMENTASI ANGGARAN, PELAPORAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN EVALUASI KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER.** Deandra Puspita Ratri; 120810301090; 105 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi baik sektor swasta maupun sektor publik. Pada organisasi publik anggaran harus diketahui oleh publik sehingga dapat memberikan evaluasi, kritik dan masukan untuk dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya, bagi organisasi swasta anggaran merupakan suatu hal yang dirahasiakan informasinya. Menurut Halim (2008), anggaran merupakan suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.

Anggaran Berbasis Kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Halim dan Kusufi, 2014). Penerapan anggaran berbasis kinerja dikatakan berhasil jika realisasi anggaran tercapai dengan maksimal dan keseluruhan proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dapat tercapai dari semakin maksimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja, ditinjau dari baiknya perencanaan anggaran yang dilakukan, persentase realisasi anggaran yang maksimal dan laporan pelaksanaan anggaran (Friska, 2014).

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu hubungan antara pihak yang mengendalikan dengan pihak pengelola suatu entitas dan secara formal memiliki hak atau kekuasaan atas entitas masing-masing tersebut. Pada hakikatnya akuntabilitas

menyangkut proses penyampaian informasi sedemikian rupa dan dalam bentuk isi yang sudah disepakati sehingga penerima informasi dapat melakukan analisis dan memberikan penilaian terhadap kerja karyawan (Moheriono, 2012). Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk dapat meningkatkan pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, berisi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dipandang penting untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Penelitian ini dilakukan di instansi-instansi yang ada di kabupaten Jember. Penentuan sampel mana saja yang akan dipilih menggunakan pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*). Kriteria dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai instansi pemerintahan dari bagian perencanaan/bagian akuntansi yang terlibat secara langsung dalam penyusunan anggaran daerah kabupaten Jember (TAPD). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran berbasis kinerja dan evaluasi kinerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Sehingga dengan semakin baiknya proses penyusunan anggaran, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan semakin meningkat

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, IMPLEMENTASI ANGGARAN, PELAPORAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN EVALUASI KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad.,SE.,M.M.,Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Yosefa Sayekti, M.Sc, Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Dr. Yosefa Sayekti, M.Sc, Ak dan Andriana, SE, M.Sc selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. Dosen akuntansi yang telah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi;
7. Bapak Sudibyo, Ibu Wiwik Martiwidiastuti, Adik, dan keluargaku yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Guru-guruku dari TK, SD, SMP dan SMA yang sudah membagikan ilmu sampai aku bisa seperti saat ini;

9. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang aku cintai, sayangi, dan pastinya yang selalu kompak;
10. Sahabat-sahabatku tercinta Yuris, Mega, Lila, Icul, Ponti, Mas Sandy, Mas Yugo dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 16 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
RINGKASAN .....	x
PRAKATA .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang Penelitian</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>1.4 Kegunaan Penelitian</b> .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	6
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	6

<b>2.2 Anggaran Sektor Publik</b> .....	6
2.2.1 Anggaran Berbasis Kerja.....	9
2.2.2 Perencanaan Anggaran .....	12
2.2.3 Implementasi Anggaran .....	13
2.2.4 Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran .....	13
2.2.5 Evaluasi Kinerja .....	15
2.2.6 Akuntabilitas Kinerja .....	15
<b>2.3 Penelitian Terdahulu</b> .....	19
<b>2.4 Kerangka Konseptual</b> .....	23
<b>2.5 Perumusan Hipotesis</b> .....	24
2.5.1 Perencanaan Anggaran .....	24
2.5.2 Implementasi Anggaran .....	25
2.5.3 Pelaporan/Pertanggungjawab Anggaran .....	26
2.5.4 Evaluasi Kinerja .....	27

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

<b>3.1 Jenis Penelitian.</b> .....	28
<b>3.2 Objek Penelitian.</b> .....	28
<b>3.3 Populasi dan Sampel.</b> .....	28
<b>3.4 Jenis dan Sumber Data.</b> .....	28
<b>3.5 Metode Pengumpulan Data</b> .....	29
<b>3.6 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	29
<b>3.7 Definisi Operasional.</b> .....	29
<b>3.8 Metode Analisis</b> .....	34
3.8.1 Statistik Deskriptif .....	34
3.8.2 Uji Kualitas Data .....	34
3.8.3 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda .....	36
3.8.5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	37
3.8.6 Uji F .....	37
3.8.7 Pengujian Hipotesis (Uji t) .....	38
<b>3.5 Kerangka Pemecahan Masalah</b> .....	39

### **BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

<b>4.1 Gambaran Umum</b> .....	40
--------------------------------	----

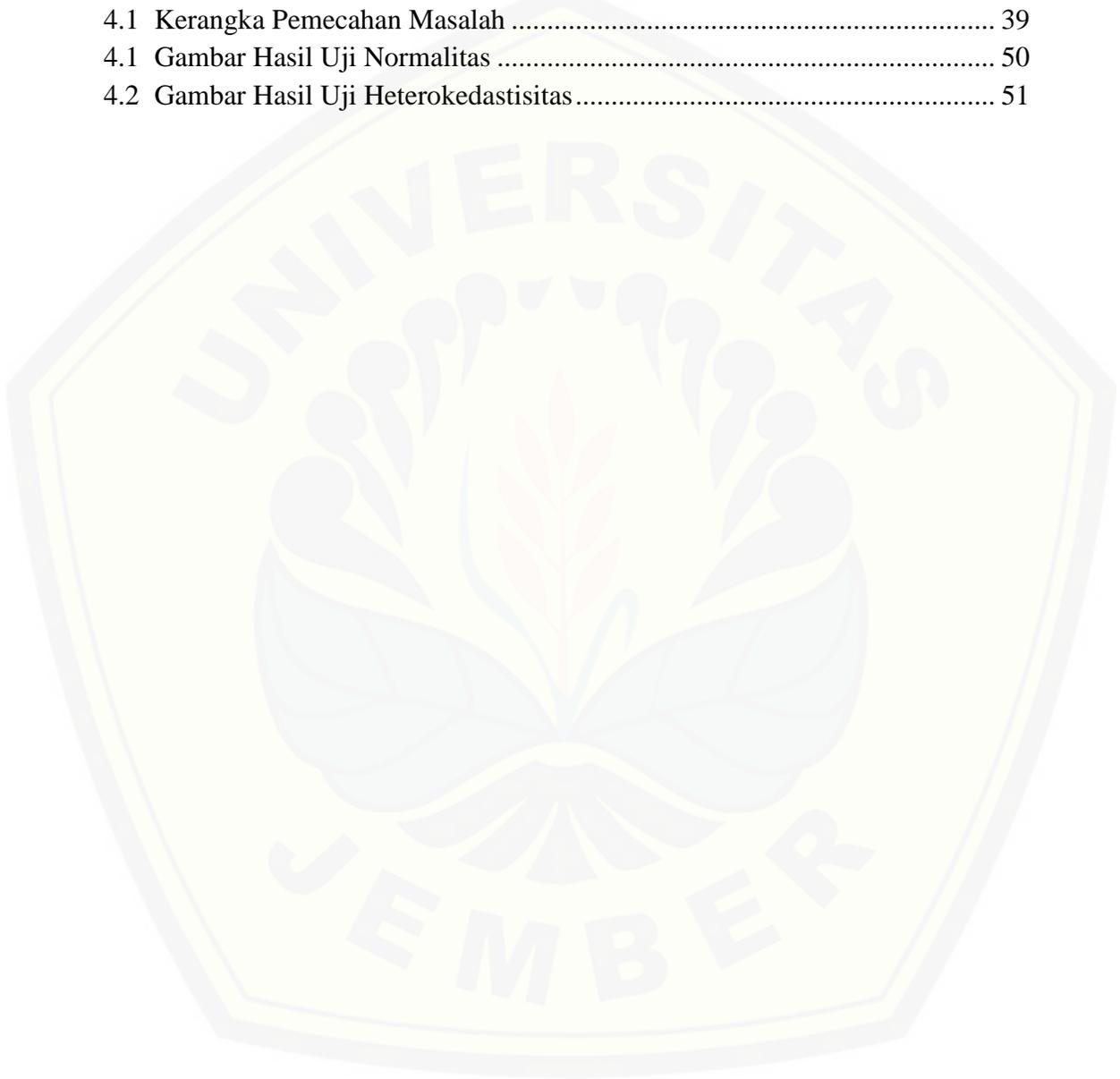
4.1.1 Deskriptif Responden .....	42
4.1.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	45
<b>4.2 Uji Kualitas Data</b> .....	<b>47</b>
4.2.1 Uji Validitas .....	47
4.2.2 Uji Reliabilitas .....	48
<b>4.3 Uji Asumsi Klasik</b> .....	<b>49</b>
4.3.1 Uji Normalitas.....	49
4.3.2 Uji Multikolinearitas .....	50
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	51
<b>4.4 Analisis Regresi Linear Berganda</b> .....	<b>52</b>
<b>4.5 Koefisien Determinasi</b> .....	<b>52</b>
<b>4.6 Uji F</b> .....	<b>53</b>
<b>4.7 Uji Hipotesis (Uji t)</b> .....	<b>54</b>
<b>4.8 Pembahasan Hasil Penelitian</b> .....	<b>54</b>
4.8.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah .....	55
4.8.2 Pengaruh Implementasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.....	56
4.8.3 Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.....	57
4.8.4 Pengaruh Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah .....	58
<b>BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN</b>	
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	<b>60</b>
<b>5.2 Keterbatasan</b> .....	<b>60</b>
<b>5.3 Saran</b> .....	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Data APBD Pemerintah Kabupaten Jember .....	3
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	21
3.1 Tabel Indikator Penelitian Perencanaan Anggaran .....	30
3.2 Tabel Indikator Penelitian Implementasi Anggaran .....	31
3.3 Tabel Indikator Penelitian Pelaporan Anggaran .....	32
3.4 Tabel Indikator Penelitian Evaluasi Kinerja .....	33
3.5 Tabel Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	33
4.1 Tabel Daftar Nama Instansi Pemerintah Kabupaten Jember .....	40
4.2 Tabel Distribusi Kuesioner .....	41
4.3 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
4.4 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	42
4.5 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	43
4.6 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .....	44
4.7 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	44
4.8 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	45
4.9 Tabel Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	46
4.10 Tabel Hasil Uji Validitas.....	47
4.11 Tabel Hasil Uji Reliabilitas.....	49
4.12 Tabel Hasil Uji Multikolinieritas .....	51
4.13 Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	52
4.14 Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	53
4.15 Tabel Hasil Uji F.....	54
4.16 Tabel Hasil Uji t.....	54

**DAFTAR GAMBAR**

2.1 Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja.....	11
2.2 Kerangka Konseptual .....	24
4.1 Kerangka Pemecahan Masalah .....	39
4.1 Gambar Hasil Uji Normalitas .....	50
4.2 Gambar Hasil Uji Heterokedastisitas.....	51



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kuisisioner Penelitian.....	65
2. Rekapitulasi Kuesioner .....	72
3. Statistik Deskriptif Variabel.....	74
4. Uji Kualitas Data.....	74
5. Analisis Regresi Linier Berganda .....	80
6. Uji Asumsi Klasik.....	81
7. Hasil Uji t.....	82
8. Hasil Uji F.....	83
9. Uji Koefisien Determinasi .....	83
10. R tabel .....	84

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi baik sektor swasta maupun sektor publik. Pada organisasi publik anggaran harus diketahui oleh publik sehingga dapat memberikan evaluasi, kritik dan masukan untuk dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya, bagi organisasi swasta anggaran merupakan suatu hal yang dirahasiakan informasinya. Menurut Halim (2008), anggaran merupakan suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.

Tahun 2000 diterbitkan Peraturan Pemerintah No 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengakibatkan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu melimpahkan wewenang dari pusat kepada daerah dan diikuti dengan pelimpahan wewenang pengelolaan dana, menghasilkan perubahan yang mengharuskan pemerintah melakukan perubahan terhadap sistem keuangannya. Terbaru diterbitkan Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Hal tersebut berarti sudah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas dan diubah lagi dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD berdasar pertimbangan yang berlaku.

Anggaran Berbasis Kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Halim dan Kusufi, 2014). Anggaran ini menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kerja output,

dimana juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dikatakan berhasil jika realisasi anggaran tercapai dengan maksimal dan keseluruhan proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dapat tercapai dari semakin maksimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja, ditinjau dari baiknya perencanaan anggaran yang dilakukan, persentase realisasi anggaran yang maksimal dan laporan pelaksanaan anggaran (Friska, 2014). Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan akan mencapai keberhasilan (Bastian, 2006)

Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengharuskan pemerintah untuk memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan anggaran, pengendalian akuntansi, dan pelaporan. Selain itu juga merubah pertanggungjawaban pemerintah tidak hanya melakukan akuntabilitas vertikal, yaitu hanya pelaporan kepada atasan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal, yaitu pelaporan kepada masyarakat luas melalui DPRD (Mardiasmo, 2002 dalam Friska, 2014).

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu hubungan antara pihak yang mengendalikan dengan pihak pengelola suatu entitas dan secara formal memiliki hak atau kekuasaan atas entitas masing-masing tersebut. Pada hakikatnya akuntabilitas menyangkut proses penyampaian informasi sedemikian rupa dan dalam bentuk isi yang sudah disepakati sehingga penerima informasi dapat melakukan analisis dan memberikan penilaian terhadap kerja karyawan (Moheriono, 2012)

Berdasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sasaran sistem AKIP adalah : (1) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, (2) terwujudnya transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat, dan (3) terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas pertanggung jawabannya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk dapat meningkatkan pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, berisi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dipandang penting untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Selain itu dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

**Tabel 1.1 Data APBD Pemerintah Kabupaten Jember**

NO	URAIAN	JUMLAH	
		APBD 2014	APBD 2015
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>2.667.046.916.473</b>	<b>3.033.788.172.456</b>
	Pendapatan Asli Daerah	460.926.574.249	508.051.016.649
	Dana Perimbangan	1.723.835.551.084	1.863.099.834.000
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	482.284.791.140	662.637.321.807
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	<b>2.760.336.916.473</b>	<b>3.129.288.172.456</b>
	Belanja Langsung	1.155.680.875.865	1.230.032.077.372
	Belanja Tidak Langsung	1.604.656.040.608	1.899.256.095.084

Sumber : jemberkab.go.id

Pemerintah Kabupaten Jember sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dan diharapkan Pemerintah dapat merealisasikan anggaran yang sudah disusun dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan

data yang didapat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) APBD di Kabupaten Jember setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2014 APBD sebesar Rp2.667.046.916.473 dan di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp3.033.788.172.456. Meskipun terus mengalami peningkatan tetapi penyerapan anggaran yang dilakukan masih kurang maksimal, seperti pada tahun 2014 penyerapan pada akhir tahun masih sekitar 61%, dan di tahun 2015 pada bulan Oktober penyerapan anggaran masih mencapai 47%. Selain itu pada saat mengajukan usulan P-APBD 2015 harus molor hal ini dikarenakan laporan pengelolaan anggaran tahun 2014 baru saja di audit. Hal ini mendasari peneliti untuk melihat pengaruh antara kenaikan APBD dengan akuntabilitas kinerja pemerintah di Kabupaten Jember.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji hal tersebut dimana setiap penelitian menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Hal tersebut yang mendasari peneliti untuk mengambil judul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Implementasi Anggaran, Pelaporan Anggaran Berbasis Kinerja dan Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jember?
3. Bagaimana pengaruh pelaporan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jember?
4. Bagaimana pengaruh evaluasi kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jember?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh perencanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pelaporan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jember
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jember

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti  
Menambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan ilmu akuntansi sektor publik secara umum.
2. Bagi Akademisi  
Memberi manfaat serta kontribusi bagi akademisi dan pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember  
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan pemerintah untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Jember.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep Akuntabilitas sendiri dapat dijelaskan menggunakan *agency theory*, dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pemberian tanggung jawab kepada pihak yang memberi untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan atas hasil upaya dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Moheriono, 2012). Dimana pihak yang diberikan tanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah (*agent*) dalam hal pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi tanggung jawab, dimana dalam hal ini adalah masyarakat yang diwakilkan oleh DPRD (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Konsep ini sesuai dengan variabel akuntabilitas kinerja pada penelitian ini.

Menurut Halim dan Abdullah (2006), menyatakan bahwa masalah keagenan di pemerintah daerah berlangsung secara terus menerus dan saling terkait pada semua tingkatan. Peraturan perundangan sendiri adalah salah satu bentuk kontrak yang bersifat *semi-given* yang dibentuk berdasarkan konstitusi oleh mekanisme politik pada level pemerintah yang lebih tinggi. Di pemerintahan sendiri terdapat suatu hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian, yaitu pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen kepada pemerintah, dari pemerintah sebagai satu kesatuan kepada menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi.

### 2.2 Anggaran Sektor Publik

Menurut Nordiawan (2006), anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang

cukup signifikan, hal ini dikarenakan anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan dimana harus diinformasikan kepada publik untuk dapat dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Dengan masalah yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, dibutuhkan perencanaan anggaran supaya kegiatan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Ada beberapa pengertian mengenai anggaran Nordiawan (2006) mengemukakan bahwa anggaran sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan :

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2014), anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Anggaran diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Pada sektor publik anggaran dianggap sebagai alat akuntabilitas publik sehingga harus diinformasikan untuk dapat didiskusikan secara terbuka, sementara pada sektor swasta anggaran dianggap sebagai sebuah rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik.

Menurut Mardiasmo (2009) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dinyatakan dalam ukuran finansial yang berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari organisasi,

meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas serta estimasi mengenai apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan belanja suatu negara selama periode tertentu. Pengertian APBN dapat dibedakan dalam arti luas yaitu anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Sedangkan dalam arti sempit, APBN berarti rencana pengeluaran dan penerimaan hanya dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki definisi sebagai rencana operasional keuangan pemda, di mana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim dan Kusufi, 2014)

Fungsi anggaran sektor publik, antara lain (Mardiasmo, 2009) :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan. Dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian. Untuk menghindari adanya pengeluaran terlalu besar, terlalu rendah, salah sasaran, atau penggunaan tidak semestinya.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik. Untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7. Anggaran sebagai alat motivasi. Untuk memotivasi agar bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

### 2.2.1 Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan, dimana manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada tiap unit kerja (Bastian, 2006)

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Variasi dalam sistem penganggaran dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut (Avionita, 2013).

Indikasi keberhasilan anggaran berbasis kinerja adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, serta adanya hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah (Isti'annah, 2010). Anggaran berbasis kinerja menekankan konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output, dimana mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan sistematis dalam proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009).

Halim dan Kusfi (2014) menjelaskan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Namun, anggaran kinerja memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

1. Hanya sedikit dari pemerintah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.
2. Banyak jasa dan aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit output atau biaya per unit yang dapat dimengerti.

3. Akun-akun dalam pemerintahan secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan. Membuat pengumpulan data untuk keperluan pengukuran kinerja sangat sulit, bahkan kadang tidak memungkinkan.
4. Kadang kala, aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan dilakukannya pengukuran lain tanpa pertimbangan yang memadai.

Tujuan dari diterapkannya penganggaran berbasis kinerja diharapkan pemerintah dapat menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik. Siklus anggaran meliputi 4 tahap yang terdiri atas (Mardiasmo, 2009) :

1. Tahap Persiapan Anggaran (*Budger Preparation*)

Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia yang didasari oleh visi, misi serta tujuan organisasi. Selain itu, psebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan terlebih dahulu.

2. Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*)

Melibatkan proses politik yang rumit. Pimpinan dituntut memiliki integritas dan kesiapan mental yang tinggi, dikarenakan pimpinan harus mempunyai kemampuan menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari legislatif.

3. Tahap Implementasi Anggaran (*Budgeting Implementation*)

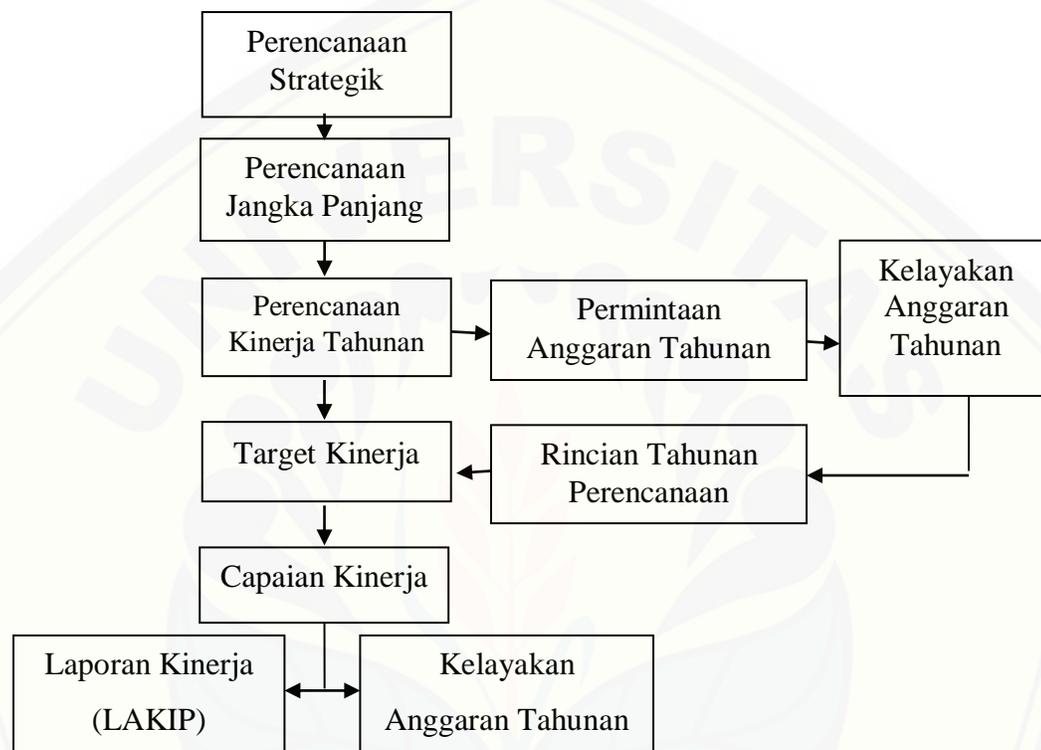
Dalam tahap ini, yang perlu diperhatikan adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan bertanggungjawab menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*Budgeting Reporting and Evaluation*)

Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran terkait aspek operasi anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi terkait aspek akuntabilitas, sehingga apabila

tahap implementasi sudah didukung dengan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik maka tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan memenuhi masalah.

Sistem penganggaran berbasis kinerja memiliki kerangka kerja yang secara sistematis dibangun untuk menghasilkan anggaran berbasis kinerja.



Gambar 2.1 Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja

Sumber : Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (2005)

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (2005), dijelaskan bahwa proses perencanaan penganggaran diawali dengan penyusunan strategi organisasi yang memiliki tujuan untuk visi, misi, tujuan serta sasaran organisasi dan untuk menetapkan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan strategis memiliki jangka waktu beberapa tahun kedepan yang komponennya memuat visi, misi, tujuan dan strategi serta program yang menyediakan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan program.

Rencana strategis tersebut dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat seluruh indikator dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun. Rencana kinerja memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang dituangkan dalam indikator kinerja kunci. Rencana ini juga merupakan tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menyelenggarakan programnya. Rencana ini diajukan kepada legislatif untuk mendapat persetujuan, sehingga terbit rencana anggaran tahunan yang disetujui oleh legislatif, lalu disusun rencana operasional tahunan.

Rencana operasional tahunan adalah rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang ada dalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan ketiga rencana tersebut, disusun kesepakatan kinerja yang berarti kesepakatan antara pemberi amanat kepada pihak yang menerima amanat tentang target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun anggaran, manajemen kinerja melakukan review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaporkan dalam laporan kinerja tahunan (LAKIP) yang meliputi laporan kinerja keuangan dan non-keuangan untuk digunakan sebagai masukan dalam membuat perencanaan anggaran di tahun berikutnya.

### **2.2.2 Perencanaan Anggaran**

Perencanaan Anggaran adalah tahap estimasi pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang sudah dirumuskan oleh instansi (Haspiarti, 2012)

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa APBN dan APBD yang dipresentasikan setiap tahunnya oleh eksekutif memberikan informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan bagaimana program-program dibiayai. Proses perencanaan anggaran memiliki 4 tujuan, yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD serta masyarakat luas.

Perencanaan anggaran disini menjelaskan bagaimana mendapatkan uang dan cara mengalokasikan dana yang didapatkan sehingga dapat digunakan dengan tepat dan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian rencana anggaran adalah perkiraan untuk waktu yang akan datang dan disusun secara sistematis atas dasar klasifikasi anggar yang digunakan.

### **2.2.3 Implementasi Anggaran**

Menurut Haspiarti (2012) implementasi anggaran melibatkan lebih banyak orang dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, implementasi anggaran harus : (1) menjamin bahwa anggaran dilaksanakan sesuai wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan, (2) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro, (3) memutuskan adanya masalah yang muncul di pelaksanaannya, dan (4) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.

Implementasi anggaran juga harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan melakukan pengawasan serta pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran.

### **2.2.4 Pelaporan / Pertanggungjawaban Anggaran**

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, berisi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang

kemudian disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dipandang penting untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Tujuan dari dibuatnya pertanggungjawaban anggaran adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran. Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca. Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional. Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas. Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Laporan Perubahan Ekuitas. Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan. Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

### 2.2.5 Evaluasi Kinerja

Menurut Tiara (2015), evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan. Berdasarkan modul akuntabilitas instansi pemerintah (2007), tujuan dilakukannya evaluasi kinerja agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang, sehingga dengan adanya evaluasi kinerja yang dilakukan dengan baik diharapkan akan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Program dan kegiatan yang dievaluasi sudah tertuang dalam perencanaan strategis instansi yang bersangkutan yang harus merujuk kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik itu input, proses, output, outcome, benefit dan impactnya, dan capaiannya.

### 2.2.6 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban pemberian pertanggung jawaban kepada pihak yang memberi untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan atas hasil upayanya dalam melaksanakan tugas atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja harus merujuk kepada spektrum yang lebih luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan organisasi, sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban tugas tanggung jawab. Konsep akuntabilitas ini tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi, melainkan kepada masyarakat umum atau *stakeholders* (Moheriono, 2012).

Dalam Mangkunegara (2005) dijelaskan bahwa penerapan akuntabilitas berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang optimal dan legal dan

harus bisa meningkatkan akuntabilitas formal yang ditetapkan organisasi. Dasar dari akuntabilitas pemerintah adalah keyakinan masyarakat yang mempunyai hak untuk mengetahui tentang pelaksanaan pemerintahan. Sehingga, publik memiliki hak untuk mengetahui apa yang direncanakan dan dilakukan pemerintah serta bagaimana kinerja pemerintah untuk mencapainya.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 2003). 3 unsur yang harus terpenuhi oleh akuntabilitas pemerintah untuk memberikan laporan kinerja, yaitu (Moheriono, 2012):

1. Memberikan hasil analisis laporan tersebut kepada penerima pertanggungjawaban dari yang menilai.
2. Menerima eksekusi kekuasaan pertanggungjawaban dari yang memberi.
3. Menerima hasil penilaian prestasi kerja dalam bentuk penghargaan atau sanksi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua undang-undang tersebut mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah selaku pengguna anggaran untuk segera menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara tiap tahun. Dalam laporan ini, pemerintah menyajikan dan mengumumkan informasi keuangan yang dapat diketahui oleh masyarakat/publik untuk dilihat dan dievaluasi atas kinerja keuangan yang telah dibuat kepada masyarakat umum.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia sudah diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Negara (LAN) No 589/IX/6/Y/1999 tentang pedoman penyusunan pelaporan AKIP yang disempurnakan melalui Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara No 239/IX/6/8/2003. Dalam tugasnya setiap instansi pemerintah harus menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berdasarkan dari rencana kerja dan kegiatan yang berpedoman dalam rencana strategis berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi instansi.

Hal tersebut lebih diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 sebagai lanjutan dari kedua undang-undang tersebut. Dalam PP ini diatur mengenai laporan kinerja yang harus dibuat dan dilaporkan oleh masing-masing instansi pemerintah dan juga dijelaskan mengenai format laporan serta petunjuk pengisian secara lengkap dan rinci. Ketentuan dalam keputusan ini agar setiap instansi memiliki rencana strategis, visi dan misi untuk mendukung proses perencanaan yang disusun oleh setiap instansi.

Selain itu juga dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dalam peraturan ini dijelaskan mengenai SAKIP yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Kegiatan SAKIP (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dalam prosesnya mencakup (1) mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik, (2) merumuskan visi, misi, tujuan sasaran dan strategi instansi pemerintah, (3) merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi, (4) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara menyeluruh, (5) mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah daerah, serta (6) melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang menjamin pengguna sumber daya secara konsisten dengan peraturan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
7. Komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi tahap-tahap (Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 2005) :

1. Perencanaan Strategis.

Meliputi penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang mengungkapkan seluruh target kinerja yang akan dicapai dari seluruh sasaran strategis dalam tahun yang bersangkutan.

2. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran ini dilakukan menggunakan perbandingan antara realisasi dengan tolak ukur yang ditentukan. Perbandingan tersebut memberikan manfaat pada pengukuran kinerja pada saat realisasi dengan yang direncanakan, tetapi bermanfaat dalam bentuk keseriusan pemerintah dan instansi dalam membuat perencanaan.

3. Pelaporan Kinerja.

Dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

#### 4. Pemanfaatan Informasi Kinerja.

LAKIP diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan memiliki wewenang yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa APBD harus disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang membuat SKPD sebagai unit pengguna anggaran dituntut untuk dapat mengajukan RKA-SKPD yang benar-benar baik, artinya sesuai dengan kebutuhan, ekonomis, efisien dan efektif. Penelitian tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya :

Muda (2005) meneliti tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan dan adanya pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan.

Nina (2009) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa implementasi penganggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Herawati (2011) melakukan penelitian dengan judul Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Jambi mempunyai pengaruh positif signifikan. Sedangkan secara parsial, yang memiliki pengaruh negatif yaitu variabel kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi, untuk variabel sistem pelaporan memiliki pengaruh yang positif.

Haspiarti (2012) meneliti Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi anggaran yang dilakukan dengan baik, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akan tetapi tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara implementasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Parepare, hal ini disebabkan adanya kemungkinan pengaruh dari perencanaan anggaran.

Friska (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD Provinsi Jambi). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan, implementasi, pelaporan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan secara parsial hanya variabel implementasi dan pelaporan yang berpengaruh positif dan komitmen organisasi hanya memoderasi implementasi anggaran saja.

Endrayani, Adiputra dan Darmawan (2014) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). Dimana hasilnya menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tentang pengaruh perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pertanggungjawaban anggaran serta evaluasi kinerja memiliki pengaruh yang positif

dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tiap daerah. Adapula hasil yang menunjukkan bahwa meskipun berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja tetapi tidak berpengaruh signifikan, hal ini dikarenakan adanya beberapa daerah yang implementasi anggarannya tidak sesuai dengan akuntabilitas kinerja instansi pada daerah tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan adalah pada skripsi ini penelitian dilakukan di tempat yang berbeda. Selain itu untuk alasan pemilihan tempat berbeda dengan peneliti sebelumnya, yaitu dikarenakan terjadinya peningkatan APBD yang tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

<b>PENELITI</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
Muda (2005)	Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan	Terdapat pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada sekretariat kota kotamadya Jakarta Selatan
Nina (2009)	Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah	Menunjukkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah

Herawati (2011)	Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi	Menunjukkan bahwa secara simultan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Jambi
Haspiarti (2012)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Kota Parepare	Implementasi anggaran yang dilakukan semakin besar, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara implementasi anggaran dan akuntabilitas kinerja.
Friska (2014)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD Provinsi Jambi)	Menunjukkan bahwa perencanaan, implementasi, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara parsial hanya variabel implementasi dan pelaporan yang berpengaruh positif, komitmen organisasi hanya memoderasi implementasi anggaran saja.
Endrayani, Adiputra dan Darmawan (2014)	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja	Menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja

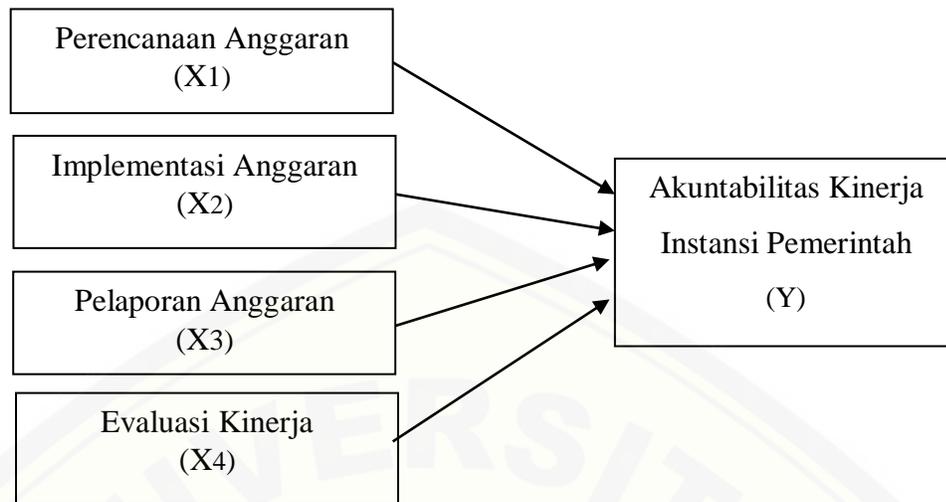
	Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja)	instansi pemerintah.
--	---	----------------------

#### 2.4 Kerangka Konseptual

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah dan didanai oleh dana publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang ditetapkan merupakan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, anggaran harus berkualitas dan realistis dan adanya pengendalian yang efektif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penganggaran akuntabilitas kinerja ditetapkan untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dalam Bastian (2006), dijelaskan bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas dapat dilihat dari bagan berikut ini :



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

## 2.5 Perumusan Hipotesis

### 2.5.1 Perencanaan Anggaran

Menurut Halim dan Abdullah (2006), teori keagenan dapat diterapkan dalam sektor publik, dimana pemerintah (*agent*) dalam hal pertanggungjawaban dan masyarakat yang diwakilkan oleh DPRD (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dengan adanya hubungan keagenan ini diharapkan *agent* dapat membuat/menentukan jumlah anggaran sesuai dengan jumlah kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan, sedangkan *principal* dapat melakukan pengawasan, juga bisa dilakukan dengan berdiskusi dengan *agent* untuk menghindari terjadinya penggelembungan dalam pembuatan anggaran, sehingga alokasi menjadi lebih besar dari seharusnya. Perencanaan Anggaran adalah tahap estimasi pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang sudah dirumuskan oleh instansi (Haspiarti, 2012).

Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Bastian, 2006).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dimana perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Parepare. Serta penelitian oleh Friska (2014) yang menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini dilihat berdasarkan uji simultan yang dilakukan (Uji F), yang berarti perencanaan anggaran memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada pemerintah Provinsi Jambi.

H1 : Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### 2.5.2 Implementasi Anggaran

Implementasi anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan melakukan pengawasan serta pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas yang dirancang sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja yang instansi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan, dimana *principal* (pemerintah) melakukan pengawasan terhadap anggaran yang digunakan untuk menjalankan kegiatan, apakah sesuai dengan yang sudah dibuat sebelumnya. Selain itu berdasarkan teori sistem terbuka, implementasi anggaran berbasis kinerja mensyaratkan adanya analisis standar belanja (ASB) dan standar pelayanan minimal (SPM) dimana kedua hal ini berperan penting dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah serta berperan sebagai indikator dan tolak ukur dalam mengukur kinerja anggaran pemerintah, apakah sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Nina (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa implementasi anggaran pada instansi pemerintah daerah memiliki pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Endrayani, Adiputra dan Darmawan (2014) dapat disimpulkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja

memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kehutanan Bali.

H2 : Implementasi Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### 2.5.3 Pelaporan Anggaran

Sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputy IV BPKP (2005) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang LAKIP. Akhir tahun anggaran setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan maka dibuat laporan kinerja meliputi laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta laporan kinerja non keuangan. Dimana laporan tersebut dianggap penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan serta digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan dimana *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, dalam hal ini berbentuk laporan, kepada *principal* bahwa anggaran yang sudah dibentuk sudah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2011) yang dapat disimpulkan bahwa pelaporan anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Jambi. Serta penelitian yang dilakukan Friska (2014), menyimpulkan bahwa pelaporan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

H3 : Pelaporan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

#### 2.5.4 Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Tujuannya untuk mengkaji ulang apakah anggaran sudah dibuat dengan benar, implementasikan anggaran sudah sesuai dengan ketetapan, dan apakah sudah di laporkan dalam bentuk laporan sesuai dengan prosedur. Sehingga dengan adanya evaluasi kinerja yang dilakukan dengan baik diharapkan akan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan, dimana dalam hal ini *agent* memiliki tanggungjawab dalam memberikan laporan (LAKIP) secara lengkap dan terbuka kepada *principal*. Hal ini bertujuan agar pihak *principal* mengetahui secara pasti apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan dapat mengetahui apakah kinerja sudah efektif, efisien dan ekonomis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kota Pare-Pare.

H4 : Evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan penelitian kausatif, yaitu penelitian yang menyatakan hubungan sebab akibat (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini digambarkan fakta-fakta yang terjadi secara jelas dan dilihat dari pengaruh masing-masing variabel penyebab (X) terhadap variabel akibat (Y)

### 3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Instansi Pemerintah Kabupaten Jember

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yg ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010 dalam Avionita 2013). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di kabupaten Jember.

Metode pemilihan sampel menggunakan Pemilihan Sampel Nonprobabilitas, yaitu pemilihan secara tidak acak. Tujuan dipilihnya metode ini dikarenakan pertimbangan waktu yang relatif lebih cepat dan biaya yang lebih murah. Dalam metode ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014). Dalam penelitian ini sampel yang dipilih merupakan responden yang berkaitan secara langsung dengan penyusunan anggaran daerah (TAPD).

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian (Supomo dan Indriantoro, 2014). Jenis data subjek yang diperoleh berupa opini, sikap, pengalaman dan karakteristik dari responden yang menjadi subjek penelitian.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, dimana dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner langsung kepada TAPD di beberapa instansi di Jember yang bersangkutan.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kuantitatif, yaitu kegiatan analisis data yang meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (Siregar, 2013)

### 3.7 Definisi Operasional

Variabel merupakan mediator antara *construct* yang abstrak dengan fenomena yang nyata (Indrianto dan Supomo, 2014). Variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran, implementasi anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala *Likert*, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor berikut :

- 1) Skor 5 untuk kategori Sangat Setuju (SS)

- 2) Skor 4 untuk kategori Setuju (S)
- 3) Skor 3 untuk kategori Netral (N)
- 4) Skor 2 untuk kategori Tidak Setuju (TS)
- 5) Skor 1 untuk kategori Sangat Tidak Setuju (STS)

Untuk memudahkan dalam penulisan dan menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional variabel yang digunakan, sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan Anggaran ( $X_1$ )

Perencanaan anggaran adalah tahap estimasi pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan.

Kuesioner yang digunakan merupakan milik Haspiarti (2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare), yang dipakai peneliti lain seperti Sulisiana (2013), Friska (2014) dan Krestiwawan (2015).

Variabel	Indikator Penelitian
Perencanaan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi, misi, dan program</li> <li>2. Catatan kerja</li> <li>3. Penyusunan dokumen</li> <li>4. Perencanaan anggaran</li> <li>5. Penyusunan RKA-SKPD</li> <li>6. Sinkronisasi program dan kegiatan</li> <li>7. Penggunaan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas</li> <li>8. Pembahasan RKA-SKPD</li> <li>9. Kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD</li> <li>10. Penetapan APBD</li> </ol>

Tabel 3.1 Indikator penelitian perencanaan anggaran

Skala pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *Likert* 5 poin. Skor tertinggi (poin 5) artinya responden Sangat Setuju dan skor terendah (poin 1) artinya responden Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti. Pada variabel ini digunakan pilihan skala jawaban responden : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)

## 2. Implementasi Anggaran ( $X_2$ )

Selama tahap implementasi, pimpinan instansi bertanggungjawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan, dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (*input*) dan *outputnya* dalam sistem akuntansi keuangan

Kuesioner yang digunakan merupakan milik Haspiarti (2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare), yang dipakai peneliti lain seperti Sulisiana (2013), Friska (2014) dan Krestiwawan (2015).

Variabel	Indikator Penelitian
Implementasi Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan anggaran</li> <li>2. Acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD</li> <li>3. Prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja</li> </ol>

Tabel 3.2 Indikator Penelitian Implementasi Anggaran

Skala pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *Likert* 5 poin. Skor tertinggi (poin 5) artinya responden Sangat Setuju dan skor terendah (poin 1) artinya responden Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti. Pada variabel ini digunakan pilihan skala jawaban responden : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)

## 3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran ( $X_3$ )

Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil kerja atau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan

Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner milik Haspiarti (2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare), yang sudah dipakai peneliti lain seperti Sulisiana (2013), Friska (2014) dan Krestiwawan (2015).

Variabel	Indikator Penelitian
Pelaporan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas</li> <li>2. Laporan keuangan SKPD dan Pemda yang dibuat sesuai dengan SAP</li> <li>3. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APDB</li> </ol>

Tabel 3.3 Indikator Penelitian Pelaporan Anggaran

Skala pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *Likert* 5 poin. Skor tertinggi (poin 5) artinya responden Sangat Setuju dan skor terendah (poin 1) artinya responden Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti. Pada variabel ini digunakan pilihan skala jawaban responden : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)

#### 4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan terhadap laporan kinerja perusahaan sehingga bisa diketahui dan dianalisis upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan atau hambatan dalam melaksanakan implementasi anggaran, pemimpin bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi penyimpangan tersebut.

Variabel	Indikator Penelitian
Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan</li> <li>2. Evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas</li> <li>3. <i>Reward</i> yang diberikan kepada SKPD</li> </ol>

Tabel 3.4 Indikator Penelitian Evaluasi Kinerja

Skala pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *Likert* 5 poin. Skor tertinggi (poin 5) artinya responden Sangat Setuju dan skor terendah (poin 1) artinya responden Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti. Pada variabel ini digunakan pilihan skala jawaban responden : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)

#### 5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Variabel	Indikator Penelitian
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian kinerja</li> <li>2. Kejelasan sasaran</li> <li>3. Visi dan misi program</li> <li>4. Evaluasi</li> <li>5. Analisis keuangan</li> <li>6. Pembuatan laporan</li> <li>7. Investigasi</li> <li>8. Pengawasan</li> </ol>

Tabel 3.5 Indikator Penelitian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Skala pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala *Likert* 5 poin. Skor tertinggi (poin 5) artinya responden Sangat Setuju dan skor terendah (poin 1) artinya responden Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ditulis peneliti. Pada variabel ini digunakan pilihan skala jawaban responden : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju)

### **3.8 Metode Analisis**

#### **3.8.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan dalam bentuk tabel numerik dan grafis (Supomo dan Indrianto, 2014). Statistik deskriptif biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan adalah : frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian), dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.

#### **3.8.2 Uji Kualitas Data**

Kesimpulan dari penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada 2 konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu :

##### **1. Uji Validitas**

Uji ini digunakan untuk mengukur valid atau tidak suatu kuesioner. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2013). Suatu kuesioner akan dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat validitas di penelitian ini diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan dan total skor konstruk menggunakan aplikasi SPSS dengan uji *coefficient correlation person*. Jika skor memiliki tingkat signifikan  $< 0,05$  maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Suyoto, 2011)

## 2. Uji Reliabilitas

Uji ini digunakan untuk mengukur handal atau tidaknya suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Reliabilitas adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, dan apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama (Siregar, 2013). Uji realibilitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara *One Shot*, dimana pengukuran tiap item pertanyaan dengan menyebar kuesioner kemudian hasil skornya diukur korelasi antara skor jawaban pada item pertanyaan yang sama dengan bantuan SPSS, dengan melihat *Corbach Alpha* ( $\alpha$ ) dimana jika nilai  $> 0,60$  maka item-item pertanyaan tersebut dikatakan *realible*.

### 3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Data yang akan diolah dengan regresi berganda dibantu dengan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) yang harus memenuhi asumsi-asumsi tertentu agar model regresi tidak bias. Ada 3 asumsi, yaitu :

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi. Ciri-ciri data yang mempunyai distribusi normal adalah (Sarwono, 2013) :

- a. Kurva frekuensi normal menunjukkan frekuensi tertinggi berada ditengah-tengah.
- b. Kurva normal berbentuk simetris sempurna.
- c. Frekuensi nilai-nilai diatas rata-rata akan benar-benar cocok dengan frekuensi nilai-nilai dibawah rata-rata karena dua bagian sisi dari tengah-tengah simetris.
- d. Frekuensi total semua nilai dalam populasi akan berada dalam area bawah kurva.
- e. Kurva normal dapat mempunyai bentuk yang berbeda-beda.

Dengan *Normal Probability Plot*, yaitu distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya.

## 2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai dari (Sarwono, 2013) :

- a. Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (a). *Tolerance Value*  $> 0,10$
- b. Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. Nilai VIF  $< 10$

## 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Terjadinya heterokedastisitas dalam model regresi jika titik-titik dalam *scatterplot* membentuk pola-pola tertentu atau berkumpul di satu sisi atau dekat nilai 0 pada sumbu Y pada kurva yang dihasilkan saat kita menggambarkan kurva dengan SPSS. Jika titik-titik data menyebar tidak secara beraturan, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Sarwono, 2013).

### 3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi adalah salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*variable independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*variable dependet*) (Siregar, 2013).

Dari data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dengan menggunakan alat analisa regresi berganda (*Multiple Regression*) dengan menggunakan program SPSS. Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Dimana

koefisien regresi ini bertujuan untuk meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada (Ghozali, 2013).

Bentuk persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

- Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- a : Konstanta
- $b_{1,2,3}$  : Koefisien regresi dari variabel independen
- $X_1$  : Perencanaan Anggaran
- $X_2$  : Implementasi Anggaran
- $X_3$  : Pelaporan Anggaran
- e : *Error term*

### 3.8.5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013)

### 3.8.6 Uji F

Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan. Uji ini digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan signifikan atau belum dengan ketentuan jika  $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$  berarti signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis dengan tingkat kepercayaan 95% (Ghozali, 2011)

### 3.8.7 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Indriantoro dan Supomo (2014) menjelaskan penggunaan metode statistik untuk penelitian terhadap satu variabel penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dapat ditentukan berdasarkan tujuan studi dan skala pengukuran variabel yang bersangkutan. Uji hipotesis terhadap satu variabel umumnya berupa uji perbedaan nilai sampel dengan populasi atau nilai dari data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis) peneliti.

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji t. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5% (0,05) sehingga (Nugroho, 2013) :

1. Hipotesis

*Ho* : Perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

*Ha* : Perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

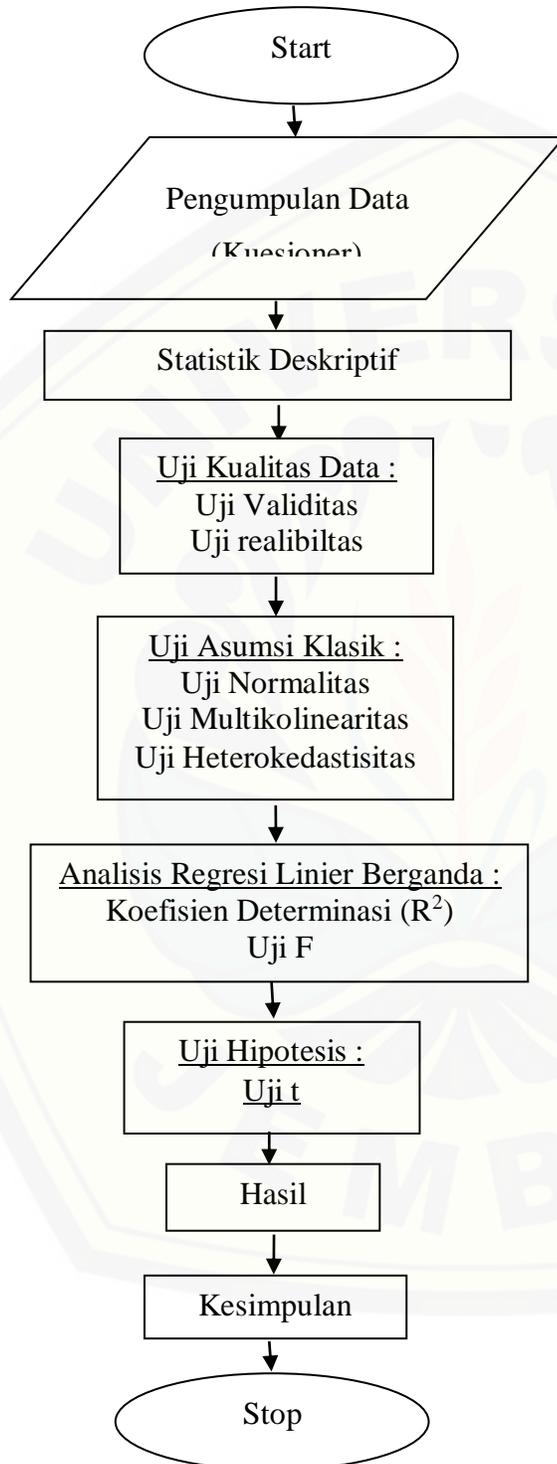
2. Kriteria Pengujian

Jika probabilitas  $> 0,05$  maka *Ha* ditolak

Jika probabilitas  $< 0,05$  maka *Ha* diterima

### 3.9 Kerangka Pemecahan Masalah

Berikut kerangka pemecahan masalah yang digunakan pada penelitian ini :



Gambar 3.1. Kerangka Pemecahan Masalah

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, Muhammad Firdiansyah & Putu Sudana. 2015. *Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Didownload dari <http://jemberkab.go.id/apbd-kabupaten-jember-tahun-anggaran-2015/>
- Avionita, Venni. 2013. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah*. Bandung
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Deputi IV BPKP. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. 2005
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Didownload dari Situs [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Endrayani, Komang Sri, I Made Pradana Adiputra, & Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja)*. Jurnal Akuntansi Program S1. Vol. 2 No.1
- Friska, Indriani Yulia. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)*. Jambi
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

- Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare*. Skripsi. Makassar
- Herawati, Netty. 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi. Vol. 13 No. 2.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta. BPFE-YOGYAKARTA.
- Isti'anah. 2010. *Penerapan dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik. Vol. 5 No. 1.
- Kepala Lembaga Administrasi Negara. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*. 2003
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta:ANDI
- Mangkunegara, DR A.A Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Penerbit Refika Aditama
- Moheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada
- Muda, Taufik Djundjung. 2005. *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan*. Disertasi. UNPAD. Jawa Barat
- Nina, Widiawati. 2009. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi*. Tesis. Jawa Barat

- Nugroho, Yohanes Anton. 2013. *Olah Data dengan SPSS*. Yogyakarta: PT. Skripta Media Creative
- Pemerintah Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Safrudin, Lian. 2016. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. Skripsi. Lampung
- Sarwono, Jonathan. 2013. *12 Jurus Ampuh SPSS Untuk Riset Skripsi*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif : dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. Jakarta. Kencana.
- Wijayanti, Anita Wahyu. Muluk, Mujibur Rahman Khairul & Nurpratiwi, Ratih. 2012. *Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan*. Skripsi. Malang
- Zuliansyah, Viki. 2012. *Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar*. Pematangsiantar

**Lampiran 1****KUESIONER PENELITIAN****IDENTITAS RESPONDEN**

Nomor Responden : ..... (diisi oleh peneliti)

Nama Badan/Instansi/Dinas : .....

Nama : .....

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Umur : .....

Latar Belakang Pendidikan :  Ekonomi / Akuntansi

Hukum

Teknik

Sosial

Lainnya

Pendidikan Terakhir :  SMA  D<sub>3</sub>

S<sub>1</sub>  S<sub>2</sub>

Bagian :  Kepala Badan/Dinas/Instansi

Sekretaris/Kabid/Kabag

Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/Kasie

Masa Kerja :  0 - 1 tahun

1 – 5 tahun

6 – 10 tahun

11 – 15 tahun

16 – 20 Tahun

>20 Tahun

## **PERNYATAAN MENGENAI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA**

Terima kasih Bapak/Ibu, telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan ini. Mohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda checklist (centang).

Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang mendekati. Jawaban akan dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka akan menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pertanyaan/pernyataan.

Dalam pernyataan mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja dibagi menjadi 3 (tiga) variabel. Variabel pertama adalah perencanaan anggaran, variable kedua implementasi anggaran, dan variable ketiga adalah pelaporan dan pertanggungjawaban anggar. Skor jawaban adalah sebagai berikut :

<b>Keterangan</b>	<b>STS</b> <b>(Sangat</b> <b>Tidak</b> <b>Setuju)</b>	<b>TS</b> <b>(Tidak</b> <b>Setuju)</b>	<b>N</b> <b>(Netral)</b>	<b>S</b> <b>(Setuju)</b>	<b>SS</b> <b>(Sangat</b> <b>Setuju)</b>
<b>Skor</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

### **Perencanaan Anggaran (X<sub>1</sub>)**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Penilaian</b>				
		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi dan program kepala daerah yang ingin dicapai.					

2	RKPD memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaannya.					
3	Dokumen KUA didasarkan pada dokumen RKPD pada periode tersebut.					
4	SKPD dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti prioritas dan PPAS dalam menyusun RKA-SKPD.					
5	Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan PPA antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.					
6	Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.					
7	Dalam penyusunan RKA-SKPD, memperhatikan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.					
8	Dalam penyusunan RKA-SKPD, RAPBD serta pembahasannya mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati antara pemerintah, DPRD, dan SKPD itu sendiri.					
9	PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD					

	menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi.					
10	Penetapan APBD menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD dari kabupaten/kota dan provinsi					

### **Implementasi Anggaran (X<sub>2</sub>)**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Penilaian</b>				
		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Dalam pelaksanaan anggaran SKPD mengacu kepada DPA dan Rencana Anggaran Kas yang telah disahkan.					
2	Dokumen Anggaran Kas dan DPA digunakan oleh BUD sebagai acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD.					
3	SKPD dalam pelaksanaan anggarannya telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DPA dan Anggaran Kas					

**Pelaporan / Pertanggungjawaban Anggaran (X<sub>3</sub>)**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Penilaian</b>				
		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi.					
2	Laporan keuangan SKPD dan Pemda yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan					
3	Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan pemda dan laporan keuangan perusahaan untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik					

**Evaluasi Kinerja (X<sub>4</sub>)**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Penilaian</b>				
		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengatasi penyimpangan atau hambatan dalam implementasi/pelaksanaan anggaran sesuai dengan Permendagri no					

	73 Tahun 2009					
2	Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan					
3	Setelah melaksanakan evaluasi kinerja, adanya <i>reward</i> yang diberikan kepada SKPD yang mencapai target anggar					

**Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)**

<u>No</u>	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					
2	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin.					
3	Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
4	Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.					
5	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					
6	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah					

	dilaksanakan					
7	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program					
8	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.					
9	Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat					
10	LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan					



21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	4	4	4	12	4	3	4	11	4	4	3	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
22	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	44	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	2	10	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	44
23	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	44	4	3	3	10	4	4	4	12	4	4	2	10	4	4	4	4	4	4	3	3	3	37	
24	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	43	4	4	4	12	4	3	3	10	4	4	4	12	5	4	4	5	5	4	4	4	4	43	
25	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	44	4	3	4	11	4	3	4	11	4	4	4	12	5	5	3	4	4	5	4	3	4	1	38
26	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	45	4	4	4	12	5	4	5	14	4	4	5	13	4	4	5	5	5	4	4	4	4	43	
27	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	44	5	5	5	15	4	5	4	13	5	5	4	14	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	45
28	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	45	4	4	5	13	5	4	4	13	5	5	4	14	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	44
29	4	4	4	3	4	5	4	4	5	5	42	4	4	3	11	4	4	3	11	3	4	4	11	3	4	4	4	4	5	4	4	4	40	
30	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	43	4	4	4	12	4	5	4	13	5	4	4	13	5	4	4	5	4	4	4	5	4	43	
31	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	43	4	5	4	13	4	5	4	13	4	5	4	13	5	4	4	4	5	4	4	4	4	42	
32	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	42	5	3	5	13	5	3	5	13	5	3	5	13	4	4	5	5	3	5	5	4	4	43	
33	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	43	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	5	5	4	4	4	4	4	4	42	
34	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	42	4	4	5	13	4	4	5	13	4	4	5	13	4	5	4	4	4	5	4	4	4	42	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
37	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	46	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
38	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	44	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	4	4	3	11	4	4	3	11	4	4	3	11	4	4	3	4	3	3	5	5	4	3	38
41	4	4	3	4	3	3	5	5	4	3	38	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	44
42	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	44	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	43
43	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	43	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42
44	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	38

**Lampiran 3 Statistik Deskriptif Variabel**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	44	37.00	50.00	44.2045	3.80073
X2	44	10.00	15.00	12.6591	1.46181
X3	44	10.00	15.00	12.8864	1.54342
X4	44	9.00	15.00	12.2273	1.77664
Y	44	37.00	50.00	43.5227	4.20680
Valid N (listwise)	44				

**Lampiran 4 Uji Kualitas Data**

**a. Uji Validitas**

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.1 0	X1
X1.1 Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	1 .381* .011 44	.381* .011 44	.442* .003 44	.157 .308 44	.235 .125 44	.147 .341 44	.306* .043 44	.302* .046 44	.396* .008 44	.239 .118 44	.495* .001 44
X1.2 Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	.381* .011 44	1 .011 44	.696* .000 44	.565* .000 44	.524* .000 44	.339* .024 44	.513* .000 44	.384* .010 44	.403* .007 44	.568** .000 44	.777* .000 44
X1.3 Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	.442* .003 44	.696* .000 44	1 .000 44	.724* .000 44	.592* .000 44	.523* .000 44	.460* .002 44	.477* .001 44	.667* .000 44	.497** .001 44	.876* .000 44
X1.4 Pearson Correlation Sig. (2- tailed)	.157 .308	.565* .000	.724* .000	1 .001	.480* .040	.311* .001	.470* .001	.526* .000	.369* .014	.355* .018	.711* .000

	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X1.5	Pearson Correlation	.235	.524*	.592*	.480*	1	.666*	.198	.407*	.564*	.432**	.755*
	Sig. (2-tailed)	.125	.000	.000	.001		.000	.197	.006	.000	.003	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X1.6	Pearson Correlation	.147	.339*	.523*	.311*	.666*	1	.288	.240	.731*	.213	.662*
	Sig. (2-tailed)	.341	.024	.000	.040	.000		.058	.117	.000	.165	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X1.7	Pearson Correlation	.306*	.513*	.460*	.470*	.198	.288	1	.370*	.379*	.088	.563*
	Sig. (2-tailed)	.043	.000	.002	.001	.197	.058		.013	.011	.570	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X1.8	Pearson Correlation	.302*	.384*	.477*	.526*	.407*	.240	.370*	1	.448*	.301*	.631*
	Sig. (2-tailed)	.046	.010	.001	.000	.006	.117	.013		.002	.047	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X1.9	Pearson Correlation	.396*	.403*	.667*	.369*	.564*	.731*	.379*	.448*	1	.362*	.775*
	Sig. (2-tailed)	.008	.007	.000	.014	.000	.000	.011	.002		.016	.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X1.10	Pearson Correlation	.239	.568*	.497*	.355*	.432*	.213	.088	.301*	.362*	1	.628*
	Sig. (2-tailed)	.118	.000	.001	.018	.003	.165	.570	.047	.016		.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
X1	Pearson Correlation	.495*	.777*	.876*	.711*	.755*	.662*	.563*	.631*	.775*	.628**	1

Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Correlations**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.526**	.549**	.808**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	44	44	44	44
X2.2	Pearson Correlation	.526**	1	.405**	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000		.006	.000
	N	44	44	44	44
X2.3	Pearson Correlation	.549**	.405**	1	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006		.000
	N	44	44	44	44
X2	Pearson Correlation	.808**	.767**	.854**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	44	44	44	44

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Correlations**

		X3.1	X3.2	X3.3	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.411**	.581**	.787**
	Sig. (2-tailed)		.006	.000	.000
	N	44	44	44	44
X3.2	Pearson Correlation	.411**	1	.409**	.754**
	Sig. (2-tailed)	.006		.006	.000
	N	44	44	44	44
X3.3	Pearson Correlation	.581**	.409**	1	.860**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006		.000
	N	44	44	44	44
X3	Pearson Correlation	.787**	.754**	.860**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	44	44	44	44

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).





	Sig. (2-tailed)	.179	.011	.000	.001	.000	.249	.231	.000	.001		.000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Y	Pearson Correlation	.533*	.729*	.811*	.762*	.711*	.630*	.692*	.698*	.881*	.696*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**b. Uji Reliabilitas**

X1

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.765	11

X2

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.825	4

X3

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.823	4

X4

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.820	4

Y

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.769	11

**Lampiran 5 Analisis Regresi Linier Berganda****Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.905 <sup>a</sup>	.819	.800	1.87965

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	623.187	4	155.797	44.096	.000 <sup>b</sup>
	Residual	137.790	39	3.533		
	Total	760.977	43			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

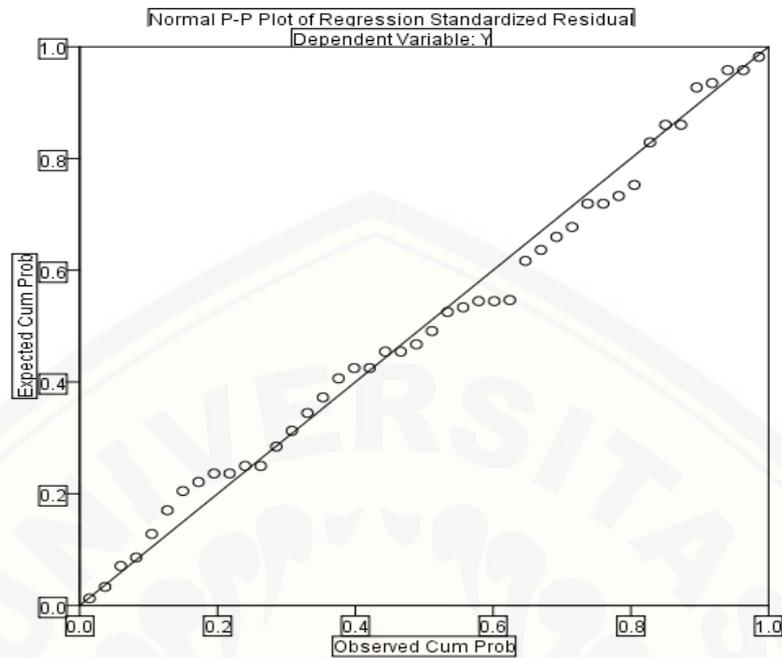
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.897	3.502		.827	.413
	X1	.346	.113	.312	3.067	.004
	X2	.749	.325	.260	2.307	.026
	X3	.817	.381	.300	2.146	.038
	X4	.435	.212	.184	2.050	.047

a. Dependent Variable: Y

**Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas**



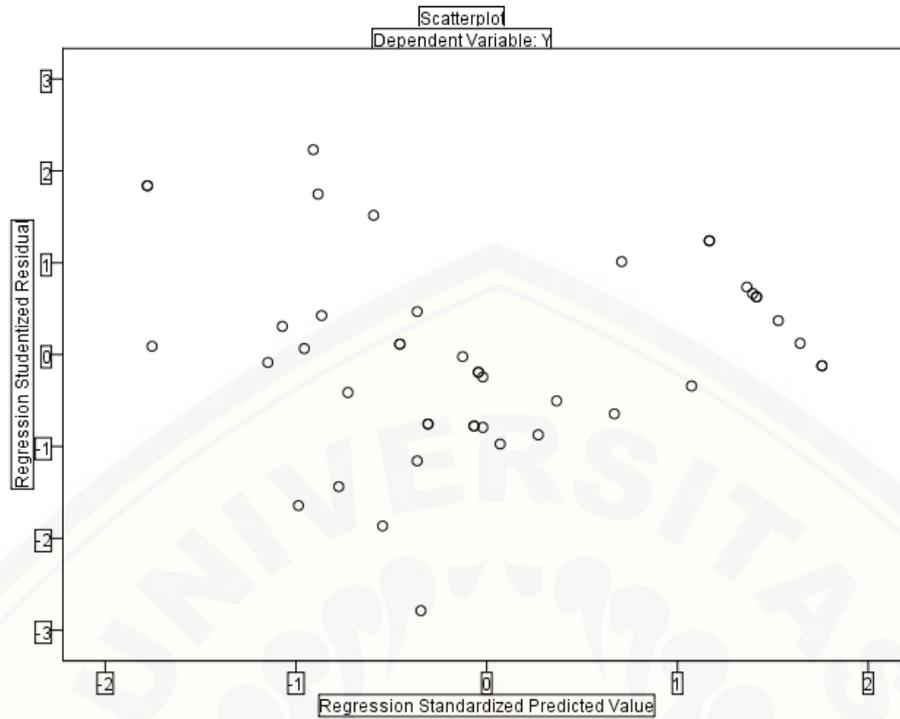
**b. Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.897	3.502		.827	.413		
X1	.346	.113	.312	3.067	.004	.447	2.236
X2	.749	.325	.260	2.307	.026	.364	2.744
X3	.817	.381	.300	2.146	.038	.238	4.198
X4	.435	.212	.184	2.050	.047	.577	1.734

a. Dependent Variable: Y

**c. Uji Heteroskedastisitas**



**Lampiran 8 Uji Hipotesis**

**a. Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.897	3.502		.827	.413
	X1	.346	.113	.312	3.067	.004
	X2	.749	.325	.260	2.307	.026
	X3	.817	.381	.300	2.146	.038
	X4	.435	.212	.184	2.050	.047

a. Dependent Variable: Y

**b. Uji F****ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	623.187	4	155.797	44.096	.000 <sup>b</sup>
	Residual	137.790	39	3.533		
	Total	760.977	43			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

**c. Uji Koefisienan Determinasi****Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.905 <sup>a</sup>	.819	.800	1.87965

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

## Lampiran 9 Rtabel

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081